



Dinas
pmptsp
Kabupaten Gresik

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Jl. Wahidin Sudirohusodo no. 245 Gresik
www.dpmpptsp.gresikkab.go.id



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 49 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

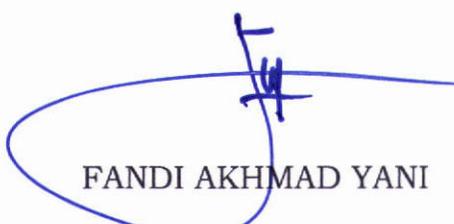
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ *49* /HK/437.12/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2024; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja di bidang Penanaman Modal I a. Ketua b. Anggota	SANTI WAHYU LESTARI, S.PI., M.AP., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) HADI SISWANTO, S.T., M.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Penanaman Modal; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Penanaman Modal; c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) ACHMAD WELLI SANTOSO, S.Sos., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 3) KARTIKO PUNGKI FAUSA, S.Pi., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Penanaman Modal; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di bidang Penanaman Modal.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja di bidang Penanaman Modal II a. Ketua b. Anggota	MEI RISNAWATI, S.T., Penata Perizinan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) SAIDAH ROCHMAH, Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Penanaman Modal; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Penanaman Modal; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		<p>2) WULAN YULISTYA L, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan</p> <p>3) MUJIONO, S.S., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.</p>	<p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Penanaman Modal;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Penanaman Modal; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di bidang Penanaman Modal.</p>
5.	<p>Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>FAUZI BUDI SETIAWAN, S.T., M.,T., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.</p> <p>1) MOHAMMAD FAKHRUL ROZY, S.Kom., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p>	<p>a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) YUFI ISLAMIAH, S.E., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 3) KASMURI, S.Pd., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II a. Ketua b. Anggota	AGUSTYA HENNY S, SS., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) RESTU BUDIYONO, S.PT., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) MOHAMMAD AINUL MUBARAK, S.Sos., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Analisis dan Pengolah data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	1) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			4) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

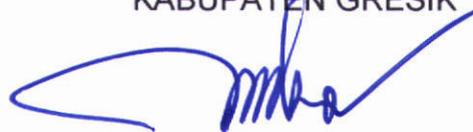
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gresik,
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO,S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760305 199511 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i	
DAFTAR ISI		iii	
DAFTAR TABEL		iv	
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD	7
		TAHUN LALU	
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	38
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
		3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	67
		Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah	67
BAB V	:	PENUTUP	73
LAMPIRAN	:	MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota	2
Tabel 2	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	7
Tabel 3	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Guna Pencapaian Sasaran	8
Tabel 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021	10
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik	19
Tabel 6	Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik	20
Tabel 7	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022	20
Tabel 8	Penerbitan Izin Tahun 2022	23
Tabel 9	Pemetaan Permasalahan	28
Tabel 10	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023	39
Tabel 11	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Gresik	51
Tabel 12	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
Tabel 13	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	59
Tabel 14	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPM PTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	61
Tabel 15	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	67

BAB I

PENDAHULUAN

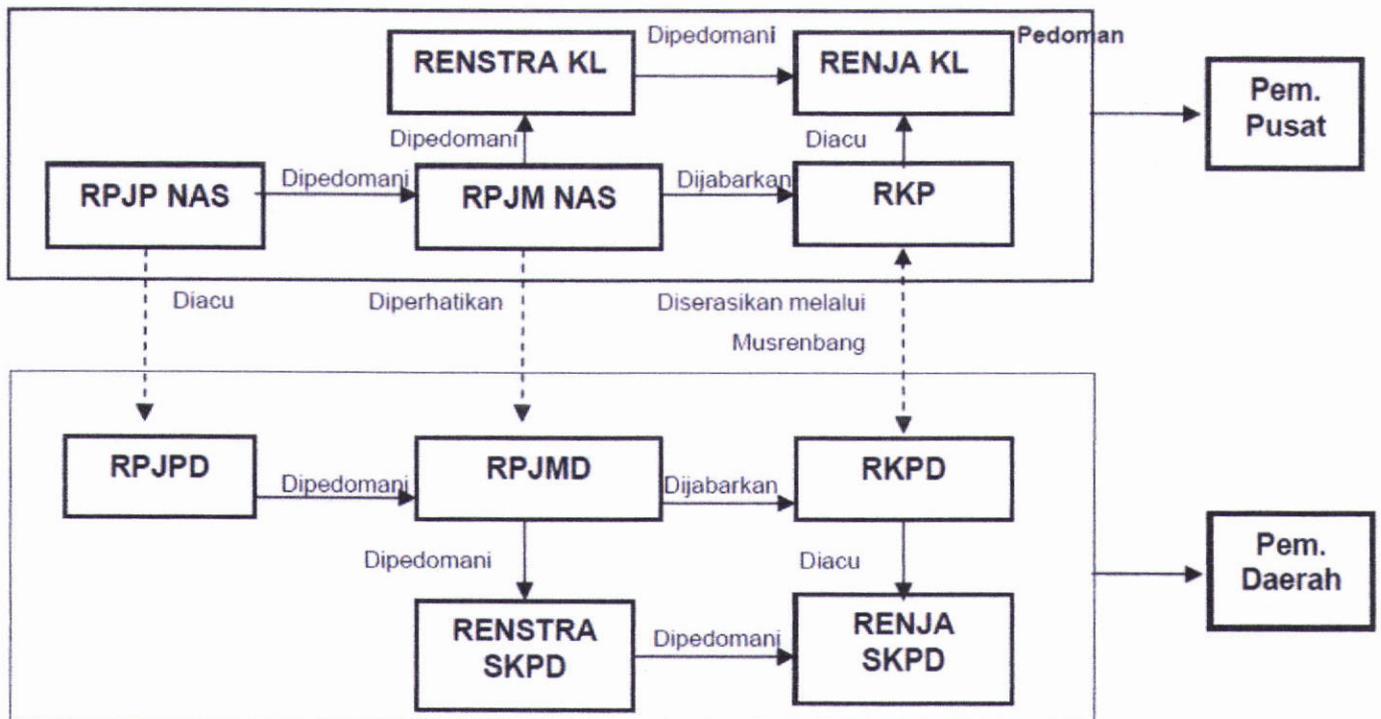
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain, Rencana Kerja DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan forum OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Renja DPMPTSP dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota:

**KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L
DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**
(Tabel 1)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
25. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 050/03/437.74/2022 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2024.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2024 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2024 dan DPA OPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
 - 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
 - 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
2. Pada Bab II berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Pada Bab III berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.
4. Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
5. Bab V berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022. Pencapaian kinerja terhadap program/kegiatan/subkegiatan dan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan dan Belanja

Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 14.492.610.495,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 14.489.830.495,- dan Belanja Modal Rp. 2.780.000,- sedangkan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 12.607.558.072,51,- (87,01%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.780.000,- (100%) dari rencana. Dengan demikian, jika Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 57.269.497.375,- maka terjadi surplus sebesar Rp. 44.659.159.302,49,- (lihat pada tabel berikut ini) :

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Tabel 2)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.	PENDAPATAN	131.678.150.000,00	57.269.497.375,00	43,49	37.440.915.825,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.678.150.000,00	57.269.497.375,00	43.49	37.440.915.825,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	131.678.150.000,00	57.063.234.756,00	43.34	37.273.429.143,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	0,00	206.262.619,00	0,00	167.486.682,00
2.	BELANJA	14.492.610.495,00	12.610.338.072,51	87,11	10.997.553.628,00
2.1	BELANJA OPERASI	14.489.830.495,00	12.607.558.072,51	87,01	10.685.946.628,00

2.1.1.	Belanja Pegawai	7.635.001.000,00	7.058.519.504,00	92,45	6.999.784.965,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.854.829.495,00	5.549.038.568,51	80,95	3.686.161.663,00
2.2	BELANJA MODAL	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00	311.607.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00	290.457.000,00
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	14.492.610.495,00	12.610.338.072,51	87,11	10.997.553.628,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	117.185.539.505,00	44.659.159.302,49	38,11	26.443.362.197,00

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp.3.918.479.158,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG GUNA PENCAPAIAN SASARAN

(Tabel 3)

NO	SASARAN	TARGET	REALISASI 2021		KET.
		KEUANGAN 2022	(Rp)	%	
1	Meningkatnya angka investasi	1.609.147.008,00	1.531.385.024,00	95,17	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	2.309.332.150,00	1.246.152.870,00	53,96	
	TOTAL	3.918.479.158,00	2.777.537.894,00	70,88	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) subkegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah sebesar 87,01 %.

Sedangkan untuk program kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 10.574.131.337 (termasuk gaji dan tunjangan) dan teralisasi sebesar Rp. 9.832.800.178,51 atau 92,98 %.

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPSTSP s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2022 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	98%	100%	90%	100%	111,11	90%	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	18 jenis dokumen	6 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100	3 jenis dokumen	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		-	-
		Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 jenis dokumen	1 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100		-	-

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100		-	-
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						51 orang/bulan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		-	-
			Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12 laporan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100		-	-
			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan						83 orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	37 sub kegiatan	7 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100	6 sub kegiatan	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	900 buah	150 buah	150 buah	150 buah	100		-	-

				Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan						1 paket		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	324 item	54 item	54 item	54 item	100		-	-
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						10 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	18 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100		-	-
				Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan						3 paket		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan	72 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100		-	-
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						2 paket		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	30 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100		-	-
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						5 dokumen		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kali	1 kali	-	-	-		-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	390 kali	65 kali	65 kali	65 kali	100		-	-
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						65 laporan		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	18 jasa	3 jasa	3 jasa	3 jasa	100	3 jasa	-	-
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	780 kali	130 kali	130 kali	130 kali	100		-	-
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat						12 laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100		-	-

		Air dan Listrik	air dan listrik								
			Umlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan						12 laporan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	192 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	100		-	-
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12 laporan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	36 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	6 kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan	100		-	-
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						1 unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	78 kendaraan	13 kendaraan	13 kendaraan	13 kendaraan	100		-	-
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya						13 unit		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	30 jenis	5 jenis	-	-	100		-	-
			Jumlah mebel yang dipelihara						5 unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	36 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100		-	-
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						6 unit		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	78 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100		-	-
				Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi						13 unit		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	30 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100		-	-
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi						5 jenis		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	163,98%	7,81%	15,62%	117,88%	754,67%	23,43%	-	-
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12 draft	2 draft	2 draft	2 draft	100	2 draft	-	-
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 draft	1 draft	1 draft	1 draft	100		-	-
				Jumlah peraturan daerah/ provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal						1 dokumen		
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 hasil evaluasi	1 hasil evaluasi	1 hasil evaluasi	1 hasil evaluasi	100		-	-
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daera						2 kegiatan usaha		

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12 draft/kajian	2 draft/kajian	2 draft/kajian	2 draft/kajian	100	2 draft/kajian	-	-
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	6 draft	1 draft	1 draft	1 draft	100		-	-
				Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota						1 dokumen		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik	6 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	100		-	-
				Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten /kota						1 kajian		
			Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	24.27 %	4.46%	10%	70%	100	4,09%	-	-
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	12 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	-	-
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	6 kajian strategi promosi	4 paket	1 paket	1 paket	100		-	-
				Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota						1 dokumen		
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi investasi	7 kali	-	1 kali	1 kali	100		-	-
				Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota						4 dokumen		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	75%	75%	117,55%	156,74	75%	-	-
			Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman	Jumlah pelayanan	29.298 pelayanan	3855 pelayanan	4175 pelayanan	37732 pelayanan	903,76	4715 pelayanan	-	-

			Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	11.360 izin	1000 izin	1515 izin	35416 izin	2337,69	-	-
				Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi						1515 pelaku usaha	
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	17.450 izin	2450 izin	2600 izin	696 izin	276,65	-	-
				Jumlah izin/ rekomendasi yang terbit						1500 izin	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	148 kali	5 kali	20 kali	12 kali	60	-	-
				Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan						25 orang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	240 kali	4 kali	8 kali	8 kali	100	-	-
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah						40 kegiatan usaha	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	30%	30%	53,42%	178,06%	30%	-

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1.037 kali	277 kali	152 kali	179 kali	117,76	152 kali	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	467 kali	60 kali	72 kali	45 kali	62,50		-	-
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal						25 kegiatan usaha		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	54 kali	11 kali	8 kali	14 kali	175,00		-	-
				Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal						450 pelaku usaha		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	516 kali	156 kali	72 kali	120 kali	166,67		-	-
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan						125 kegiatan usaha		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	4	4	4	100	5	-	-
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	18 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	-	-
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemanfaat sistem informasi	25.700 pengunjung	3800 pengunjung	4000 pengunjung	89605 pengunjung	2240,13		-	-
				Jumlah data dan informasi perizinan dan non						2 dokumen		

					perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan realisasi investasi	-	-	2.98%	2.89%	5.00%	46.54%	11.04%	36,64%	40.00%	47.50%	-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	SANGAT BAIK (91.095)	SANGAT BAIK (88.31)	SANGAT BAIK (88.5)	SANGAT BAIK (88.6)	SANGAT BAIK (91.103)	SANGAT BAIK (91.435)	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama investasi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan penanaman modal yang diarahkan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi. Penilaian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2022 dapat dilihat dari peningkatan realisasi investasi yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 118.19% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sehingga Kabupaten Gresik menjadi

daerah tujuan penanaman modal. Realisasi investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016-2022 seperti tampak pada tabel data berikut:

Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PMA (US\$ Ribu)	348.001	436.663,7	165.375,8	98.346,9	271.462,8	581.652,9	1.730.695,90
PMDN (Rp.Juta)	3.982.980,6	4.449.254,7	3.452.308,199	3.199.731	14.411.137,4	8.271.422,7	6.751.577,80
RPJMD							
	2016	2017	2018	2019	2020		
TARGET	27,45	31,45	35,45	39,45	43,45	-	-
REALISASI	25,73	42,34	48,34	52,93	69,45	-	-
CAPAIAN	93,73%	134,63%	136,36%	134,17%	159,84		

Tabel 2.7
Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,98 %	11,05%	370,81%
2022	2,89%	36,64%	1267,82 %

Di tengah ekonomi yang masih mengalami pasang surut di tahun 2017, sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami kenaikan mencapai 11,70% di tahun 2017 atau sebesar Rp. 4.449.254.700.000,00 (empat trilyun empat ratus empat puluh

sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Senada dengan sektor penanaman modal dalam negeri yang mengalami pertumbuhan, investor asingpun masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap investasi di Kabupaten Gresik. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya realisasi investasi asing dari US\$ 348.001.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta seribu US dollar) di tahun 2016 menjadi US\$ 436.663.700 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor investasi dalam negeri di Kabupaten Gresik justru *survive* di tengah-tengah carut marutnya perlambatan ekonomi yang dirasakan secara nasional.

Di tahun 2018 dan 2019 di tengah perekonomian yang sepenuhnya belum membaik, investasi masih mengalami sedikit peningkatan seperti tampak dalam tabel diatas. Namun di tahun 2019 rencana investasi baik PMDN maupun PMA tidak dapat disajikan karena adanya perubahan sistem aplikasi dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) menjadi aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berbeda di tahun sebelumnya, di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 capaian investasi naik signifikan sebesar 159,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik tidak terpengaruh atau terimbas signifikan oleh dampak wabah tersebut. Perkembangan investasi domestik justru menunjukkan kontribusi meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya dengan selisih 11.211.406,4 (dalam juta rupiah) atau bertumbuh sebesar 350,39%. Sedangkan investasi di sektor mancanegara juga mengalami selisih positif sebesar 173.115,9 (dalam ribu US\$) atau bertumbuh sebesar 176,02%. Kondisi peningkatan investasi ini tidak luput dari peran seluruh stakeholders yang terkait dengan kondusivitas iklim

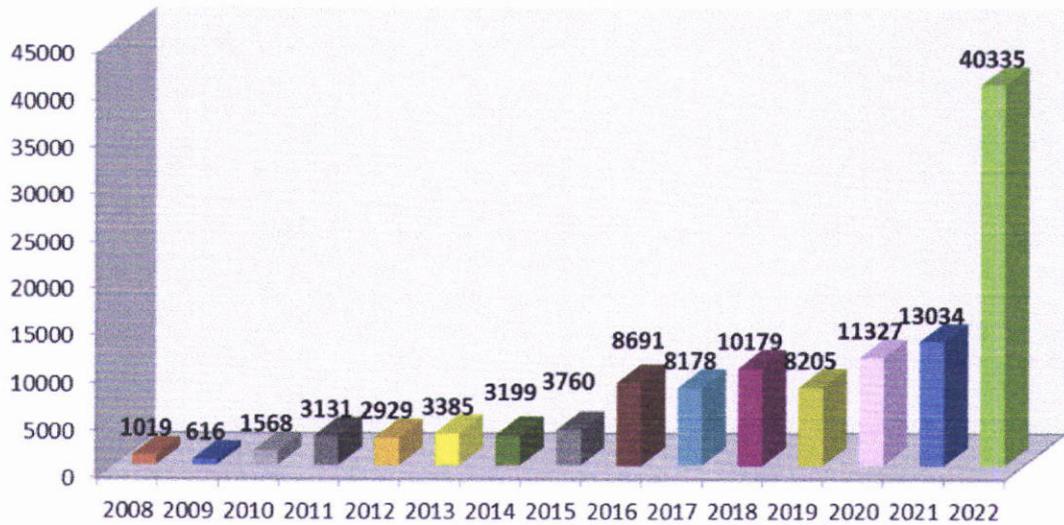
investasi yang didukung oleh peran pemerintah, legislatif, masyarakat dan tentunya dunia usaha serta asosiasi yang ada.

Untuk tahun 2021-2026 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang pertama yaitu “Meningkatnya angka investasi” berubah indikatornya menjadi “ **Pertumbuhan realisasi investasi**”. Dimana sesuai dengan tabel 2.7 pertumbuhan realisasi investasi mengalami kenaikan 118,19 % dari tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya mulai bangkitnya ekonomi pasca pandemi COVID – 19 yang membuat investor mulai menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik seperti PT. Freeport Indonesia.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2008 sampai akhir 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melayani *customer* sebanyak 119.556 (serratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh enam) pemohon izin, sesuai data penerbitan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana grafik terlampir.

Gambar 2.1
Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2008-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Bisa diasumsikan bahwa sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berdiri di tahun 2007, maka selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, apabila diasumsikan dalam satu tahun ada kurang lebih 8000 (delapan ribu) berkas. Berikut disampaikan tabel penerbitan izin selama tahun 2022

Tabel
Penerbitan Izin Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	
I	NON OSS														
	A	Site Plan	1	3	7	9	2	5	3	7	2	3	6	6	54
	B	PBG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	IMB	25	54	28	39	18	29	167	39	28	12	34	0	473
	D	PKKPR	0	0	35	127	18	12	10	12	11	3	23	0	251
	E	PKPLH	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	F	SIM Pasar	50	20	68	77	0	8	0	35	28	69	10	74	439
	G	Izin Pendirian SMP	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	6

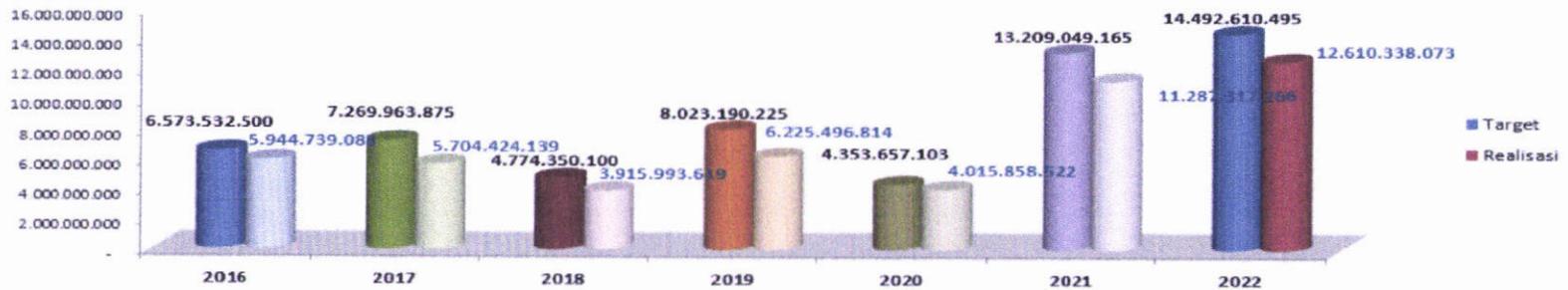
No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	
II	H Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	
	I Izin Pendirian Satuan PAUD	1	0	4	5	0	5	6	3	7	13	5	11	60	
	J Izin Reklame Insidental	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	
	K Reklame Tetap Terbatas dan Permanen	21	30	40	0	0	0	56	36	0	9	90	0	282	
	OSS														
	NIB	1055	998	1245	1066	770	1066	1081	1159	1830	2437	3663	1619		17989
	Izin	1	0	2	0	0	0	1	3	4	2	0	7		20
	Persyarat Dasar	1089	950	1084	937	655	1220	1174	1442	2055	2728	2195	1823		17352
	Umku	38	63	66	38	121	34	171	78	100	43	62	61		875
	Sertifikat Standar	141	155	160	123	10	192	198	209	337	439	304	245		2513
Jumlah	2422	2289	2740	2421	1594	2573	2867	3026	4403	5760	6393	3847		40335	

Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

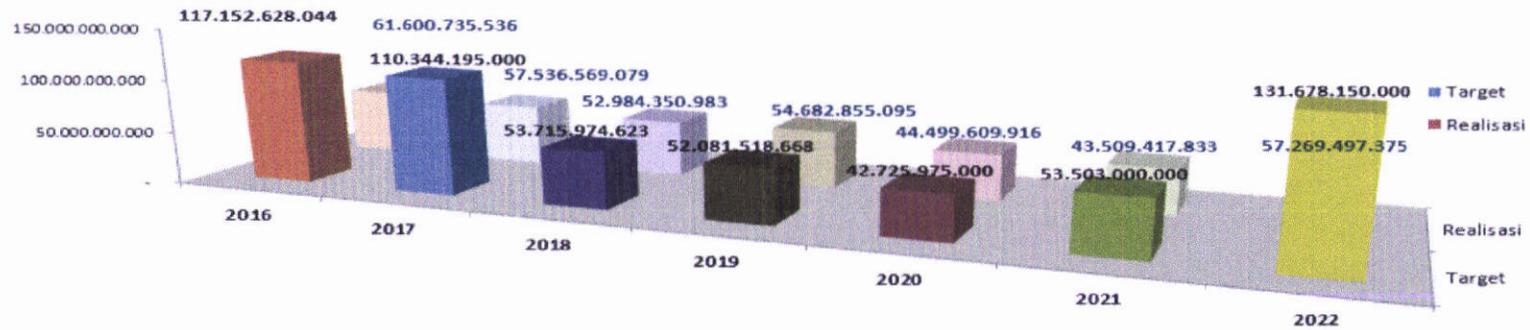
Telah disebutkan di awal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi. Capaian kinerja dengan fungsi pelayanan telah diuraikan di atas. Sedangkan fungsi pembangunan yang terkait dengan kegiatan operasional dengan alokasi

dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan dalam dua grafik yaitu grafik target dan realisasi belanja dan grafik target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama kurun waktu lima tahun atau periode 2016-2022 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Gambar 2.3
Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2020
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Dari grafik APBD tahun 2016-2022 dapat dilihat bahwa anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mengalami naik turun seperti pada tahun 2020 mengalami penurunan target belanja sebesar Rp. 3.669.533.122,- dikarenakan adanya pandemi COVID 19 sehingga anggaran mengalami refocussing karena dialihkan untuk penanganan COVID 19. Di tahun 2021 dan 2022 APBD mengalami kenaikan dikarenakan anggaran gaji dan tunjangan ikut dalam belanja kegiatan.

Berbeda dari target belanja yang mengalami naik turun mengikuti kondisi ekonomi dan negara, pencapaian PAD mulai tahun 2016-2022 mengalami kestabilan walaupun target yang ditentukan juga mengalami naik turun selaras dengan target belanja. Penetapan target pendapatan seringkali tidak memperhatikan potensi pendapatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak dapat menolak target yang telah ditetapkan oleh pihak legislatif. Realisasi PAD terutama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipengaruhi banyak faktor salah satunya kondisi ekonomi dan kepercayaan pengusaha untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Sehingga target pendapatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak bisa disamakan dengan target perolehan pajak dan sejenisnya yang setiap tahun mengalami kenaikan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa identifikasi permasalahan-permasalahan di bidang penanaman modal dan perizinan diantaranya sebagai berikut :

Tabel.
Pemetaan Permasalahan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlambatan/penurunan realisasi penanaman modal akibat pandemi COVID-19 dan realisasi penanaman modal belum terlalu efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB)	Proses pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan tata ruang (PKKPR) belum dapat dilaksanakan secara maksimal	Adanya transisi Sistem OSS 1.1 kedalam OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan penggunaannya yang belum maksimal dikarenakan masih terkendala sistem dari pusat
	Belum terkoneksi OSS RBA dengan beberapa sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain seperti sistem KPP dari BPN	
	Belum adanya peraturan daerah tentang penanaman modal dan peraturan bupati terkait pelayanan perizinan berusaha yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 dan Nomor 06 Tahun 2021	Tumpang tindihnya regulasi sektoral yang berlaku dan minimnya koordinasi antar lembaga sektoral karena adanya ego sektoral
	Belum adanya regulasi yang mengatur secara teknis tentang pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha	
	SIMBG belum dapat diimplementasikan	
	Sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang OSS baik secara langsung/tatap muka maupun melalui medsos sangat minim	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami tentang OSS

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	SDM yang kurang memahami regulasi maupun IT	Pelayanan terhadap pelaku usaha yang sering dirasa tidak sesuai keinginan mereka
	Pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh instansi sendiri maupun dari luar kepada SDM DPMPSP yang terbatas	
	Keengganan perusahaan untuk dikunjungi dalam rangka kegiatan pemantauan, pengawasan maupun verifikasi	Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan
	Penyajian data realisasi investasi sering terlambat karena meskipun sudah dirilis oleh BKPM tetapi belum masuk pada aplikasi NSWI (<i>National Single Window for Investment</i>)	Ketidaksinkronan data
	Keterbatasan SDM. SDM selain sebagai front office juga sebagai backoffice. Sehingga data yang diminta tidak dapat terpenuhi cepat.	
	Kepedulian pelaku usaha untuk melaporkan nilai realisasi investasi melalui LKPM sangat minim	

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana, dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif maka dengan bertitik tolak dari fakta sejarah serta kondisi faktual maka berdasarkan masa bhakti 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan

nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

**“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri,
Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan
Akhlakul Karimah”**

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagai berikut:

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2	Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan

dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3	<p>Gresik yang Berdaya Saing</p> <p>Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada</p>
---	--

		<p>pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.</p>
4	Gresik Berkemajuan	<p>yang Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.</p>
5	Gresik Berlandaskan Akhlakul Karimah	<p>yang Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang</p>

karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan yaitu :

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota;

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan social dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik masuk pada **Misi ke-3** Kabupaten Gresik yaitu '**Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah**' dengan **Tujuan ke-3** yaitu '**Menguatkan Pembangunan Perekonomian Gresik yang inklusif** ' dan indikator kinerjanya yaitu : Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu sasaran ke- 6 yaitu : '**Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sekolah dan Antar Wilayah**' dengan indikator kinerja yaitu Indeks Williamson yang merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar

kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja OPD.

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang merinci struktur kelembagaan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP termasuk perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP nantinya akan berdiri sendiri, tidak ada campur tangan kepala daerah dalam tanda tangan untuk pengeluaran izin, semua akan berbasis elektronik. Sehingga dapat memutus rantai birokrasi yang panjang. Hal ini selain dapat mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik juga merupakan tantangan bagi daerah untuk dapat mempersiapkan baik dari segi sarana prasarana maupun SDM dalam mendukung terlaksananya peraturan pemerintah tersebut.
2. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dimana penerbitan perizinan berusaha dan dokumen lain yang berkaitan dilakukan oleh Lembaga OSS. Dalam perjalanannya OSS mengalami transisi, dimulai OSS versi 1.0 pada tahun 2018, OSS versi 1.1 pada tahun 2019 (surat Edaran BKPM Nomor :

5743/A.8/B.1/2019 tahun 2019 tentang Rencana Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1) dan OSS RBA yang secara resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Walaupun telah beberapa kali mengalami transisi, penggunaan OSS masih belum maksimal karena terkendala sistem dari pusat. Selain itu OSS RBA juga belum terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang baik bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maupun bagi para investor/pemohon izin dalam memanfaatkan hadirnya OSS ini.

Tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP diantaranya untuk dapat melaksanakan amanat PP Nomor 24 Tahun 2018 ini secara maksimal mungkin sehingga OSS ini dapat berjalan dan dapat dipahami oleh investor/pemohon yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik.

Peluang bagi investor/pemohon izin dengan terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 ini adalah kemudahan dalam memperoleh izin. Karena dengan mengakses OSS ini investor/pemohon izin sudah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan Akses Kepabeanan.

3. Lokasi Kabupaten Gresik yang sebagai *hinterland* Kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di kawasan Indonesia Timur dan sekaligus pintu yang menghubungkan dunia luar baik regional maupun internasional dengan dukungan pelabuhan dan bandara internasional. Hal ini dapat membuat para investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.
4. Dijadikannya JIPE (*Java Integrated Industrial and Port Estate*) sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui PP Nomor 71 Tahun 2021. Hal ini dapat mendorong para investor

untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik, karena adanya KEK dapat memberikan fasilitas akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026. Untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengemban Nawa Karsa ke 5 yaitu **Gema Karya** dengan output kunci '**Koridor Investasi Gresik (KIG)**'.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdapat 8 program dan 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 13.448.452.000,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2024 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.448.452.000	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.448.452.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				13.448.452.000	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				13.448.452.000	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	90%	10.530.909.000	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	90%	10.530.909.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	125.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	125.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	75.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	7.524.621.499	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	7.524.621.499	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/bulan	7.509.621.499	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/bulan	7.509.621.499	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	134.334.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	134.334.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	134.334.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	134.334.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	566.726.401	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	566.726.401	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.210.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.210.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	200.000.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	125.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	125.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	20.000.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	4.919.970	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	4.919.970	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	122.640.431	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	122.640.431	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	78.956.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	78.956.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.371.906.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.371.906.000	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4.536.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4.536.000	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	386.184.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	386.184.000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	981.186.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	981.186.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	808.321.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	808.321.100	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42.195.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42.195.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	92.922.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	92.922.000	
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	131.100.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	131.100.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	58.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	58.300.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	550.692.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	550.692.500	
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	51.111.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	51.111.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	540.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	540.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	120.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif f dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	120.000.000	
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	60.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	60.000.000	
23	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	2 kegiatan usaha	60.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	2 kegiatan usaha	60.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	420.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	420.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	
25	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	370.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	370.000.000	
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	3,93%	630.422.000	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	3,93%	630.422.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	630.422.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	630.422.000	
26	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	55.422.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	55.422.000	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 dokumen	575.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 dokumen	575.000.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	1.170.000.000	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	1.170.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5083 pelayanan	1.170.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5083 pelayanan	1.170.000.000	
28	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1515 pelaku usaha	300.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1515 pelaku usaha	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2800 kegiatan usaha	700.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2800 kegiatan usaha	700.000.000	
30	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 orang	70.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 orang	70.000.000	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40 kegiatan usaha	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	.0.	40 kegiatan usaha	100.000.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	527.121.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	527.121.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	527.121.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	527.121.000	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	25 kegiatan usaha	39.004.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	25 kegiatan usaha	39.004.000	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	450 pelaku usaha	371.043.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	450 pelaku usaha	371.043.500	
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	125 kegiatan usaha	117.073.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	125 kegiatan usaha	117.073.500	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	50.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	50.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	50.000.000	
34	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen (realisasi investasi perizinan dan non perizinan)	50.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen (realisasi investasi perizinan dan non perizinan)	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				-
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				-
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 laporan	-

			Kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/bulan	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	-
12	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 laporan	-

			pelayanan umum kantor yang disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	-
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	13 unit	-
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	-
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	-
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	-
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	-
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	-
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	-
21	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	-
22	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	2 kegiatan usaha	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	-
23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
24	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	3,93%	-

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	-
25	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
26	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 dokumen	-
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	-
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5083 pelayanan	-
27	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1515 pelaku usaha	-
28	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2800 kegiatan usaha	-
29	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 orang	-
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	40 kegiatan usaha	-
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	-

31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 kegiatan usaha	-
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	450 pelaku usaha	-
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	125 kegiatan usaha	-
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	-
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	-
34	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. 	Kewenangan pemrosesan izin sebagian masih berada pada instansi – instansi teknis
2	Kewenangan penerbitan izin investasi diatas >10 milyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 	Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupate/kota.
3	Pelaksanaan OSS (One Single submission)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 2. Peraturan Pemerintah 	Penerapan OSS belum resmi diterapkan di daerah namun SPIPSE sebagai sistem

		Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelayanan perizinan investasi sebagai sistem yang diterapkan sebelumnya, telah dihentikan
4	Regulasi dan kebijakan yang <i>out of date</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015-2019 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota 	Regulasi yang menjadi acuan dalam dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan di daerah perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sesuai Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung misi ketiga Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah”**. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan tujuan dari misi ketiga RPJMD 2021-2026 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada di dalamnya yaitu **“Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif”**. Sementara sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021-2026 yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Gresik adalah sasaran ke-enam, yaitu **“Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor Antar Wilayah”**. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan DPMPTSP Kabupaten Gresik yang akan dicapai adalah sebagai berikut : **“Menciptakan iklim investasi yang kondusif”**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dua sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya angka investasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan realisasi investasi
2. Nilai survey kepuasan masyarakat

Untuk memperoleh gambaran hubungan antara keduanya, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dilihat di Tabel 4.1

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
			Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	2.98%	2.89%	5.00%	46.54%	45.00%	44.02%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (91.095)	SANGAT BAIK (88.31)	SANGAT BAIK (88.5)	SANGAT BAIK (88.31)	SANGAT BAIK (88.31)	SANGAT BAIK (88.31)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : *Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah*

Misi ke 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- Kewenangan penerbitan izin investasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun 2022 terdapat 6 program dan 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 13.448.452.000,-

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta ringkasan prioritas permasalahan penanaman modal dan perizinan tahun 2024 dan program/kegiatan utama untuk menyelesaikannya.

Table 2.7 (T-C.33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.448.452.000				13.448.452.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				13.448.452.000				13.448.452.000
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan		95%	10.530.909.000			95%	10.530.909.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		3 jenis dokumen	125.000.000			3 jenis dokumen	125.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	50.000.000	APBD	-	1 dokumen	50.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 laporan	75.000.000	APBD	-	2 laporan	75.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		2 dokumen	7.524.621.499			2 dokumen	7.524.621.499
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Dinas Penanaman	53 orang/bulan	7.509.621.499	APBD	-	53 orang/bulan	7.509.621.499

		ASN	Modal dan PTSP						
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	15.000.000	APBD	-	12 laporan	15.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 paket	134.334.000			1 paket	134.334.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83 orang	134.334.000	APBD	-	83 orang	134.334.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		6 sub kegiatan	566.726.401			6 sub kegiatan	566.726.401
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	15.210.000	APBD	-	1 paket	15.210.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10 paket	200.000.000	APBD	-	10 paket	200.000.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 paket	125.000.000	APBD	-	3 paket	125.000.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 paket	20.000.000	APBD	-	2 paket	20.000.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 dokumen	4.919.970	APBD	-	5 dokumen	4.919.970
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	65 laporan	122.640.431	APBD	-	65 laporan	122.640.431
12	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	78.956.000	APBD		1 dokumen	78.956.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jasa	1.371.906.000			3 jasa	1.371.906.000
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	4.536.000	APBD	-	12 laporan	4.536.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	386.184.000	APBD	-	12 laporan	386.184.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	981.186.000	APBD	-	12 laporan	981.186.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		6 jenis	808.321.100			6 jenis	808.321.100
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 unit	42.195.600	APBD	-	1 unit	42.195.600
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13 unit	92.922.000	APBD	-	13 unit	92.922.000
18	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 unit	13.100.000	APBD	-	5 unit	13.100.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 unit	58.300.000	APBD	-	6 unit	58.300.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13 unit	550.692.500	APBD	-	13 unit	550.692.500
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 unit	51.111.000	APBD	-	3 unit	51.111.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		31,23%	540.000.000			31,23%	540.000.000

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft	120.000.000			2 draft	120.000.000
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	60.000.000	APBD	-	1 dokumen	60.000.000
23	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 kegiatan usaha	60.000.000	APBD	-	2 kegiatan usaha	60.000.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun		2 draft/ kajian	420.000.000			2 draft/ kajian	420.000.000
24	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	50.000.000	APBD	-	1 dokumen	50.000.000
25	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	370.000.000	APBD	-	1 dokumen	370.000.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal		3,93%	630.422.000			3,93%	630.422.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal		2 jenis	630.422.000			2 jenis	630.422.000
26	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	55.422.000	APBD	-	1 dokumen	55.422.000
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4 dokumen	575.000.000	APBD	-	4 dokumen	575.000.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin		75%	1.170.000.000			75%	1.170.000.000
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah pelayanan		5083 pelayanan	1.170.000.000			5083 pelayanan	1.170.000.000

	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
28	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1515 pelaku usaha	300.000.000	APBD	-	1515 pelaku usaha	300.000.000
29	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2800 kegiatan usaha	700.000.000	APBD	-	2800 kegiatan usaha	700.000.000
30	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25 orang	70.000.000	APBD	-	25 orang	70.000.000
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	40 kegiatan usaha	100.000.000	APBD	-	40 kegiatan usaha	100.000.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan		30%	527.121.000			30%	527.121.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		152 kali	527.121.000			152 kali	527.121.000
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25 kegiatan usaha	39.004.000	APBD dan DAK	-	25 kegiatan usaha	39.004.000
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	450 pelaku usaha	371.043.500	APBD dan DAK	-	450 pelaku usaha	371.043.500

34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	125 kegiatan usaha	117.073.500	APBD dan DAK	-	125 kegiatan usaha	117.073.500
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal		5	50.000.000			5	50.000.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi		3 jenis	50.000.000			3 jenis	50.000.000
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 dokumen	50.000.000	APBD	-	2 dokumen	50.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Table 2.8

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

No Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.448.452.000	13.448.452.000
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				13.448.452.000	13.448.452.000
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	95%	10.530.909.000	10.530.909.000
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	125.000.000	125.000.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	50.000.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	75.000.000	75.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	7.524.621.499	7.524.621.499
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/bulan	7.509.621.499	7.509.621.499

2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	15.000.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	134.334.000	134.334.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	134.334.000	134.334.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	566.726.401	566.726.401
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.210.000	15.210.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	200.000.000	200.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	125.000.000	125.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	20.000.000	20.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	4.919.970	4.919.970
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	122.640.431	122.640.431
2.18.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	78.956.000	78.956.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.371.906.000	1.371.906.000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4.536.000	4.536.000

2.18.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	386.184.000	386.184.000
2.18.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	981.186.000	981.186.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	808.321.100	808.321.100
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42.195.600	42.195.600
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	13 unit	92.922.000	92.922.000
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	13.100.000	13.100.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	58.300.000	58.300.000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	550.692.500	550.692.500
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	51.111.000	51.111.000
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	31,23%	540.000.000	540.000.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	120.000.000	120.000.000
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	60.000.000	60.000.000

2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	2 kegiatan usaha	60.000.000	60.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	420.000.000	420.000.000
2.18.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	50.000.000
2.18.02.2.01.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	370.000.000	370.000.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	3,93%	630.422.000	630.422.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	630.422.000	630.422.000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	55.422.000	55.422.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	4 dokumen	575.000.000	575.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Ijin	75%	1.170.000.000	1.170.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5083 pelayanan	1.170.000.000	1.170.000.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1515 pelaku usaha	300.000.000	300.000.000

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2800 kegiatan usaha	700.000.000	700.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 orang	70.000.000	70.000.000
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	40 kegiatan usaha	100.000.000	100.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	527.121.000	527.121.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	527.121.000	527.121.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 kegiatan usaha	39.004.000	39.004.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	450 pelaku usaha	371.043.500	371.043.500
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	125 kegiatan usaha	117.073.500	117.073.500

2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	50.000.000	50.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	50.000.000	50.000.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	50.000.000	50.000.000

BAB V PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik,

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO, S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760305 199511 1001

LAMPIRAN

**MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.448.452.000	
2,18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				13.448.452.000	
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan		98%	10.530.909.000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		3 jenis dokumen	125.000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM PTSP	1 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM PTSP	2 laporan	75.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		2 dokumen	7.524.621.499	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPM PTSP	53 orang/ bulan	7.509.621.499	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	DPM PTSP	12 laporan	15.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 paket	134.334.000	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPM PTSP	83 orang	134.334.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		6 sub kegiatan	566.726.401	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPM PTSP	1 paket	15.210.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPM PTSP	10 paket	200.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DPM PTSP	3 paket	125.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPM PTSP	2 paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DPM PTSP	5 dokumen	4.919.970	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	65 laporan	122.640.431	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	DPM PTSP	1 dokumen	78.956.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jasa	1.371.906.000	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	12 laporan	4.536.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPM PTSP	12 laporan	386.184.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPM PTSP	12 laporan	981.186.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		6 jenis	808.321.100	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPM PTSP	1 unit	42.195.600	Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DPM PTSP	13 unit	92.922.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	DPM PTSP	5 unit	13.100.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DPM PTSP	6 unit	58.300.000	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	DPM PTSP	13 jenis	550.692.500	Dana Alokasi Umum
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DPM PTSP	5 jenis	51.111.000	Dana Alokasi Umum
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		10,00%	540.000.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft	120.000.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	1 dokumen	60.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	DPM PTSP	2 kegiatan usaha	60.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun		2 draft/kajian	420.000.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPM PTSP	1 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPM PTSP	1 kajian	370.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal		10%	630.422.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal		2 jenis	630.422.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPM PTSP	1 dokumen	55.422.000	Dana Alokasi Umum
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	DPM PTSP	4 dokumen, 1 kali pameran, 3 kali iklan media cetak	575.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin		75%	1.170.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan		4175 pelayanan	1.170.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP	1515 pelaku usaha	300.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	DPM PTSP	2800 kegiatan usaha	700.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	DPM PTSP	25 orang	70.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPM PTSP	40 kegiatan usaha	100.000.000	Dana Alokasi Umum
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan		30%	527.121.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		152 kali	527.121.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	DPM PTSP	25 kegiatan usaha	39.004.000	Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	DPM PTSP	450 pelaku usaha	371.043.500	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	DPM PTSP	125 kegiatan usaha	117.073.500	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal		4	50.000.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan Informasi		3 jenis	50.000.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	DPM PTSP	2 dokumen (realisasi investasi perizinan dan non perizinan)	50.000.000	Dana Alokasi Umum